KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pengadaan Gorden Rumdin Anggota DPR Dihentikan
Tanggal : Rabu, 18 Mei 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

Pengadaan Gorden Rumdin Anggota DPR Dihentikan

■ FEBRIANTO ADI SAPUTRO

JAKARTA — Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI memutuskan tak melanjutkan proyek tender pengadaan gorden rumah dinas (rumdin) anggota DPR RI dengan anggaran sebesar Rp 43,5 miliar. Penghentian ini merespons pro dan kontra pengadaan gorden rumah dinas anggota dewan yang ramai dibicarakan publik belakangan ini.

"BURT memutuskan sekretariat jenderal untuk tidak melanjutkan pelaksanaan pengadaan gorden, vitrase, dan blind rumah jabatan RJA DPR RI Kalibata. Saya kira itu yang menjadi kesimpulan rapat setelah melalui rapat dan diskusi panjang antara BURT dan Kesetjenan," kata Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso di Jakarta, Selasa (17/5).

Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah mendengar penjelasan dari Setjen DPR RI. "Dari pembahasan tadi yang disampaikan, baik oleh pak sekjen maupun oleh inspektorat DPR, kami semua sepakat di BURT, jadi tidak ada yang tidak sepakat, termasuk pak sekjen juga sepakat bahwa pengadaan gorden untuk rumah jabatan anggota DPR RI tahun 2022 tidak dilanjutkan," ujarnya.

Sekjen DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, secara kronologis terkait rencana pengadaan gorden. Ia menuturkan, DPR tidak pernah melakukan pengadaan gorden selama 14 tahun terakhir. DPR mengusulkan pengadaan tersebut pada 2021.

Terkait penentuan harganya, Indra menjelaskan, bahwa DPR mencari harga menengah. Menurutnya, DPR tidak mungkin mencari harga yang paling bawah atau harga paling atas.

"Kami mencari titik tengah dari harga gorden yang ada di pasaran, konsultan melakukan *sampling* ke beberapa toko di daerah Panglima Polim, di daerah Tanah Abang, di Tanjung Duren, dan beberapa tempat dapatlah mencari harga tengah yang dijadikan HPS," katanya menjelaskan.

Dari 49 perusahaan yang mendaftar, hanya tiga perusahaan yang melakukan penawaran. Dari tiga perusahaan, hanya dua yang memenuhi syarat administrasi.

"Dari dua perusahaan ini, hanya satu yang memenuhi persyaratan teknis. Kita tahu saat ini di situasi covid, bersama pimpinan BURT mengambil kesimpulan untuk tidak melanjutkan proses ini," ujarnya.

Sebelumnya, DPR RI telah menetapkan PT Bertiga Mitra Solusi sebagai pemenang lelang pengadaan gorden rumdin anggota DPR RI. PT Bertiga Mitra Solusi mengajukan harga penawaran Rp 43.577.559.594,23 atau di bawah HPS 4,78 persen.

Dua perusahaan lainnya yang melakukan penawaran, yakni PT Sultan Sukses Mandiri dengan harga penawaran Rp 37.794.795.705, 00 atau di bawah HPS 10,33 persen dan PT Panderman Jaya dengan harga penawaran Rp 42.149.350.236,00 atau di bawah HPS 7,91 persen.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendesak DPR RI membatalkan anggaran pengadaan gorden rumah dinas DPR RI senilai Rp 43,5 miliar. Menurut dia, pengadaan gorden tersebut bukan sesuatu yang urgen dan akan melukai masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar pengadaan gorden DPR RI jangan sampai menyalahi aturan. KPK juga mengaku bakal melakukan penindakan jika nantinya ditemukan pelanggaran pidana dalam pengadaan gorden DPR RI.

■ **ed:** ratna puspita